

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik merupakan penerapan cara-cara melayani publik (masyarakat luas) di sebuah lembaga pemerintah. Lain dengan sektor swasta yang mempunyai tujuan mencari keuntungan. Organisasi sektor publik memiliki arah sesuai dengan misi yang ditetapkan berdasarkan UU, peraturan pemerintah yang berlaku. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk visi misi suatu organisasi.

Menurut (Mardiasmo 2009) Manajemen keuangan masyarakat yang diamanahkan oleh SKPD memiliki kaitannya dengan penerapan dan perlakuan sesuai dengan pedoman lembaga keuangan pemerintah. Tujuan akuntansi pada lembaga di sektor publik ialah memberikan keterangan yang dibutuhkan lembaga swasta atau pemerintahan yang berkompeten di dalam mengelola suatu kegiatan dalam mengelola potensi sumber daya yang diamanahkan kepada lembaga agar lebih optimal, efisien, ekonomis dan berdayaguna bagi masyarakat luas serta melaporkan hasil secara tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan di suatu organisasi pemerintahan serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik, mengikuti laporan American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933). Dapat disimpulkan dari sejumlah penelitian di atas maka, akuntansi sektor publik berkaitan dengan penyediaan informasi dalam pengendalian

manajemen dan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis. Perlu adanya peningkatan terhadap efektivitas penerapan akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik, hendaknya dengan menggapai tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik.

Gejala nan ada di Indonesia menggambarkan kuatnya tuntutan pertanggungjawaban atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah yang dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal. Akuntansi sektor publik terkait erat dengan wewenang daerah. Wewenang daerah yaitu hak, dan kewajiban dalam mendalangi dan menata urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat daerah sebanding atas peraturan perundang-unadngan yang diatur dalam (UU 32/2004).

Di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2014, laporan hasil keuangan dalam LHP BPK cukup banyak kejanggalan, sebab BPK dalam laporan hasil keuangan Pemerintah Jawa Tengah memberi predikat wajar tanpa pengecualian namun di sisi lain memberi 108 rekomendasi dan menemukan 33 kejanggalan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh pemerintah daerah belum sesuai harapan dan masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi.

Pemerintah daerah dituntut lebih gesit dan peka dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan kedapatan 3 patokan nan diterapkan pemerintah daerah agar lebih gesit, jelas, dan termakbul bagi khalayak umum untuk dapat mewujudkan good governance, yaitu sebagai berikut : (1) mendengarkan usulan-usulan kelompok juga menumbuhkan swadaya masyarakat, (2) memperbaiki

peraturan dan pengawasan manajemen, dan (3) membangun pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Dengan menerapkan ketiga patokan tersebut akan saling menunjang dan menumbuh kembangkan iklim berinvestasi di daerah dan tepat sasaran pembangunan daerah.

Dalam siklus akuntansi sektor publik, laporan keuangan adalah pertanggungjawaban perolehan akhir atas prosedur akuntansi, dan sebagai bahan evaluasi perencanaan, keputusan oleh berbagai pihak yang berkompeten. Laporan keuangan yang menunjukkan produktivitas kinerja dan efektivitas suatu organisasi sebagai tolok ukur suatu kegiatan, peningkatan realisasi dalam pencapaian target pendapatan yang diperoleh, realisasi pembelanjaan, serta realisasi pembiayaan (Indra Bastian, 2010) dalam Wulan Putri (2012).

Pelaksanaan akuntansi yang baik oleh organisasi perangkat daerah dan monitoring, evaluasi yang ideal tentang bobot laporan keuangan organisasi perangkat daerah diharapkan berkenaan berhasil membenahi pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintahan sehingga kapasitas dalam mengelola pekerjaan pemerintahan tercapai secara ideal. Dengan memperbaiki kapasitas pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan diharapkan dapat mencapai kualitas akuntabilitas kinerja yang optimal & good governance dapat dicapai oleh pemerintah, juga mengurangi aksi korupsi. (Urip Santoso dan Yohanes 2008).

Salah satu faktor yang mempengaruhi Akuntansi sektor publik adalah penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan menata sistem informasi berbasis teknologi komputer atau

website. Sistem informasi yang ditunjang Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika ditata menjadi sistem informasi yang efektif. Pada era globalisasi saat ini para pengambil keputusan organisasi untuk memberikan inovasi dan motivasi agar mencapai perubahan yang lebih maju yang beralih atas kontribusi sistem informasi nan didukung untuk penggunaan Teknologi Informasi yang tepat dalam penggunaan.

Dalam penerapannya Teknologi Informasi senantiasa dilaraskan dengan rencana organisasi, agar setiap penerapan Teknologi Informasi dapat memberikan nilai bagi organisasi itu sendiri. Budaya selaku variabel bebas nan merajai kinerja personel dalam memajukan kinerjanya & akan meningkatkan lembaga itu sendiri. Seumpama budaya telah melekat dalam lembaga, kemudian koordinasi dan pengawasan berlandaskan anggotanya akan lebih mudah untuk dikendalikan sebagaimana individu mengendalikan dirinya sendiri. (Suprianto 2009) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung kinerja auditor internal. Suprianto& Dedi (2013), juga menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang baik dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia strategis. Suprianto (2009) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota pada semua organisasi pemerintah.

Keberhasilan penerapan akuntansi sektor publik tidak terlepas dari pengaruh budaya organisasi. Budaya organisasi adalah perilaku bersama dalam menyikapi, mengantisipasi permasalahan dalam mengemban suatu tugas

organisasi pemerintahan. Budaya organisasi mempunyai arti yakni sebuah pendapat nan luas yang diterapkan bagi anggota organisasi & selaku bentuk yang memiliki kebersamaan Robbins (2005:15). Budaya organisasi mempunyai manfaat yakni sebagai pemecahan kasus dalam prosedur bertahan dalam suatu kelompok dan pembiasaan pada lingkungan dalam dan luar suatu organisasi. Oleh karena itu budaya organisasi perlu dikembangkan lebih dalam lagi agar mampu menjadi pemacu gerak langkah anggota organisasi pemerintahan. Menurut Winardi (2003:246) menyatakan penerapan budaya organisasi bertujuan agar seluruh individu dalam suatu lembaga pemerintahan dapat mentaati dan berprinsip pada aturan dan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dalam lembaga pemerintah tersebut. Menurut Nurmala Eka (2012) menyuarakkan budaya organisasi berimbas positif atas efektivitas penerapan akuntansi sektor publik.

Dalam laporan *Global Competitiveness Report 2015-2016* menunjukkan, dari 140 negara yang dinilai, Indonesia berada pada peringkat ke 37 dalam hal institusi, infrastruktur, ekonomi makro, efisiensi tenaga kerja termasuk halnya budaya organisasi pada suatu negara. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai organisasi Negara bangsa memerlukan budaya organisasi. Karena pemerintah tidak memberi perhatian mendalam terhadap perubahan budaya organisasi yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta amanah dan yang menjadi penyebabnya yakni budaya organisasi kurang berhasil pada suatu lembaga, Sofian Effendi (2005).

Hubungan akuntansi sektor publik dengan good governance itu kuat, sebagaimana akuntansi sektor publik berguna sebagai sarana bakal menjalankan

penggarapan secara tekun dan cermat pada *good governanance* ke tatanan yang lebih nyata. Seperti halnya penelitian Urip Santoso Yohanes (2008) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Melalui sejumlah pendapat diatas maka bisa menyiratkan kalau akuntansi sektor publik memegangi tugas yang amat bernilai bagi tercapainya *Good Governance*.

Penggalian ini mereplikasikan penelitian oleh Eka Nurmala Sari (2012) mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap good governance SKPD di Medan, dengan menambahkan variabel Teknologi Informasi (Suprianto, 2014). Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun danobjek penelitian. Penelitian Eka Nurmala Sari dilakukan pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Objek pada peneitian sebelumnya yaitu SKPD di Medan. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kabupaten Semarang. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebagai variabel intervening serta dampaknya terhadap Good Governance SKPD di Pemkab Semarang.**

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka pemerintah seharusnya lebih memperhatikan budaya organisasi, teknologi informasi dan akuntansi sektor publik agar Good Governance berjalan secara maksimal, oleh sebab itu rumusan dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntansi sektor publik?
2. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntansi sektor publik?
3. Apakah akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap good governance?
4. Apakah Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap good governance?
5. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap good governance?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Menganalisis pengaruh positif teknologi informasi terhadap akuntansi sektor publik.
2. Menganalisis pengaruh positif budaya organisasi terhadap akuntansi sektor publik.
3. Menganalisis pengaruh positif Efektivitas Akuntansi Sektor Publik terhadap Good Governance.
4. Menganalisis pengaruh positif teknologi informasi terhadap good governance.
5. Menganalisis apa pengaruh positif budaya organisasi terhadap good governance.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang baik bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penggalian ini diharapkan bisa menganjurkan wawasan positif perihal efektivitas dalam menerapkan akuntansi sektor publik di Indonesia terutama untuk menganalisis hubungan akuntansi sektor publik terhadap teknologi informasi, budaya organisasi, dan good governance di Indonesia & menyampaikan anjuran untuk Pemerintah daerah tatkala pennggarapan kebijakan di periode yang hendak datang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat dan sebagai pertimbangan yang berguna bagi pihak Instansi yang terkait agar lebih mengetahui bagaimana budaya organisasi dlm suatu perusahaan, bagaimana pelaksanaan teknologi informasi di dalam sebuah Instansi, serta dapat menerapkan efektivitas akuntansi sektor publik mengenai good governance untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yang dilayaninya yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat

Menunjang dalam mengantarkan rekomendasi untuk suatu peraturan, sebagai program yang direncanakan oleh sebuah lembaga maupun lingkaran masyarakat dimana keadaan yang terkandung dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan sumber yang bermanfaat sebagai pengetahuan dan sumber pemikiran untuk memperbaiki kedepannya mengenai menerapkan efektivitas akuntansi sektor publik.

5. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.